



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2151/DJA/OT.01.3/SK/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN ASESOR EKSTERNAL

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah Asesor Eksternal yang dimiliki Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih sedikit, sehingga perlu menambah Asesor Eksternal untuk melakukan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian pada kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Tingkat Dasar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama pada tanggal 8 s/d 11 Maret 2018 di Semarang, terdapat peserta yang layak untuk diangkat sebagai Asesor Eksternal;
 - c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penetapan Asesor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

- Memperhatikan :
1. Hasil Penilaian Peserta Bimbingan dan Pelatihan Tingkat Dasar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2077.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2077.c/DJA/OT.01.3/SK/10/2018, tanggal 4 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Tim Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PENETAPAN ASESOR EKSTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA**
- Kesatu : Menetapkan nama-nama Asesor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Melaksanakan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* terhadap Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada kegiatan Akreditasi Penjaminan Badan Peradilan Agama, dengan ketentuan:
- a. Melakukan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* berdasarkan penugasan yang diberikan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
 - b. Melakukan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* secara objektif dan independen mengacu Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
 - c. Melakukan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* dengan menggunakan metode telusur (*tracking*) yang meliputi penelaahan dokumen, wawancara, observasi dan simulasi.
 - d. Menjaga Kode Etik Asesor selama melaksanakan *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance*;
 - e. Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

- f. Membuat dan menyerahkan laporan hasil *Asesmen Eksternal* atau *Asesmen Surveillance* kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

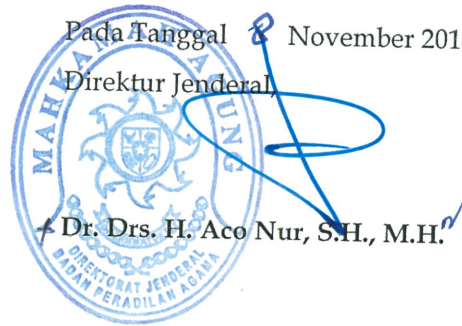
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 8 November 2018

Direktur Jenderal



Tembusan disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
5. Yth. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
6. Yth. Para Asesor Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
 Mahkamah Agung RI
 Nomor **2151** /DJA/OT.01.3/XI/2018
 Tanggal **8** November 2018

**PENETAPAN DAFTAR NAMA ASESOR EKSTERNAL
 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
I	Ditjen Badilag			
1.	Drs. H. Andi Kurniawan, M.M. NIP. 19681204.199303.1.004	Sekretaris	Ditjen Badilag	Asesor lama
2.	Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. NIP. 19670522.199303.1.003	Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama	Ditjen Badilag	Asesor baru
3.	Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. NIP 19660710 199403 1 002	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Monitoring	Ditjen Badilag	Asesor lama
4.	Sutarno, S.I.P., M.M. 19730217.199203.1.001	Kepala Bagian Umum	Ditjen Badilag	Asesor lama
5.	Bambang Subroto, S.H., M.M. NIP. 19620728.198703.1.001	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ditjen Badilag	Asesor lama
6.	Arief Gunawansyah, S.H., M.H. NIP. 19670624.198903.1.001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ditjen Badilag	Asesor baru
7.	Hj. Umiyati, S.H. NIP. 19610116.198903.2.005	Kepala Subdit Tata Kelola	Ditjen Badilag	Asesor baru
II	MS Aceh			
1.	Khairuddin, S.H., M.H. NIP. 19700811.199403.1.004	Sekretaris	MS Aceh	Asesor baru
2.	Jainal Tabrani, S.H., M.H. NIP. 19840814.200704.1.001	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	MS Aceh	Asesor baru
III	PTA Sumatera Utara			
1.	Drs. Kurthubi, M.H. NIP. 19660629.199303.1.001	Panitera	PTA Sumatera Utara	Asesor baru

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
IV	PTA Sumatera Barat			
1.	Irsyadi, S.Ag., M.Ag. NIP. 19700702.199603.1.005	Sekretaris	PTA Sumatera Barat	Asesor baru
2.	Drs. Samwil, S.H. NIP. 19561231.198703.1.012	Panitera Muda Hukum	PTA Sumatera Barat	Asesor baru
V	PTA Riau			
1.	Drs. H. Syamsikar NIP. 19570928.198703.1.001	Panitera	PTA Riau	Asesor baru
2.	Yohan Fauzi Yulises, S.Ag., M.H. NIP. 19700709.199603.1.001	Sekretaris	PTA Riau	Asesor baru
VI	PTA Bengkulu			
1.	Drs. H. Pelmizar, M.H.I. NIP. 19561112.198103.1.009	Ketua	PTA Bengkulu	Asesor baru
2.	H. Nursani, S.H. NIP. 19660610.199103.1.005	Sekretaris	PTA Bengkulu	Asesor baru
3.	Willcovin Alwintara D, S. Kom. NIP. 19900919.200904.1.001	Staf	PTA Bengkulu	Asesor lama
VII	PTA Jambi			
1.	H. Idris Latif, S.H., M.H. NIP. 19640410.199303.1.002	Sekretaris	PTA Jambi	Asesor baru
VIII	PTA Bangka Belitung			
1.	Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H. NIP. 19551008.198403.1.010	Wakil Ketua	PTA Bangka Belitung	Asesor baru
2.	Drs. Mursid Amirudin NIP. 19590529.198903.1.002	Panitera	PTA Sulawesi Utara	Asesor baru
3.	Aziz Falahudin, S.H., M.H. NIP. 19660617.199303.1.002	Sekretaris	PTA Bangka Belitung	Asesor baru
IX	PTA Sumatera Selatan			
1.	Drs. H. Abdullah, SH., MH NIP. 19600316.198903.1.001	Hakim Tinggi	PTA Sumatera Selatan	Asesor lama
X	PTA Bandar Lampung			
1.	Dr. Syahril, S.H., M.H. NIP. 19570807.198403.1.002	Wakil Ketua	PTA Bandar Lampung	Asesor baru

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
2.	Yosrinaldo Syarief, S.H., M.H. 19750421.200312.1.002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	PTA Bandar Lampung	Asesor baru
3.	Drs. Erwin Romel, M.H. NIP. 19671215.199303.1.006	Panitera Muda Banding	PTA Bandar Lampung	Asesor baru
XI	PTA DKI Jakarta			
1.	Drs. Arief Hidayat, S.H. NIP. 19680904.199303.1.004	Sekretaris	PTA DKI Jakarta	Asesor lama
2.	Rizal Mutaqin, S.E., M.M. NIP. 19760521.200502.1.001	Sekretaris	PA Jakarta Pusat	Asesor lama
XII	PTA Jawa Barat			
1.	Drs. Muhammad Yamin, M.H. NIP. 19600519.198603.1.005	Panitera	PTA Jawa Barat	Asesor baru
2.	Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. NIP. 19680318.199303.1.002	Sekretaris	PTA Jawa Barat	Asesor lama
3.	Rustandi, S.Ag. NIP. 19690817.199503.1.001	Kabag Umum dan Keuangan	PTA Jawa Barat	Asesor lama
XIII	PTA Banten			
1.	Mila Novita, S.E. NIP. 19881120.200904.2.002	Staf	PTA Banten	Asesor lama
XIV	PTA Jawa Tengah			
1.	Tukiran, S.H., M.M. NIP. 19580320.198303.1.005	Panitera	PTA Jawa Tengah	Asesor lama
2.	Abdul Mutalip, S.Ag., S.H. NIP. 19701102.199703.1.001	Sekretaris	PTA Jawa Tengah	Asesor lama
3.	Sutris, S.H., M.H. NIP. 19680609.199003.1.005	Sekretaris	PA Pekalongan	Asesor lama
4.	Zulfikar Arif Rahman Purba, S.H., M.M. NIP. 19781109.199803.1.002	Sekretaris	PA Wonosobo	Asesor lama
XV	PTA Jawa Timur			
1.	Dra. Hj. Zulaecho, M.H. NIP. 19550721.198503.2.001	Hakim Tinggi	PTA Jawa Timur	Asesor baru
2.	Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag. NIP. 19680109.199303.1.001	Panitera	PTA Jawa Timur	Asesor baru
3.	Hj. Diah Anggraeni, S.H., M.H. NIP. 19770501.199903.2.001	Panitera Pengganti	PTA Jawa Timur	Asesor baru

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
4.	Rohmad Bahrudin, S. Kom. NIP. 19820205.200604.1.005	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	PTA Jawa Timur	Asesor lama
5.	Rusmin Rapi, S.T. NIP. 19730103.200604.1.001	Kasubbag Kepegawaian dan TI	PTA Jawa Timur	Asesor lama
XVI	PTA DI Yogyakarta			
1.	Karyarini Fatonah, S.H., M.M. NIP. 19660501.199103.2.001	Sekretaris	PTA DI Yogyakarta	Asesor lama
XVII	PTA Kalimantan Barat			
1.	Rusli, S.H., M.H. NIP. 19641231.199403.1.048	Panitera	PTA Kalimantan Barat	Asesor baru
2.	Naffi, S.Ag., M.H. NIP. 19701201.199903.1.004	Sekretaris	PTA Kalimantan Barat	Asesor baru
XVIII	PTA Kalimantan Selatan			
1.	Drs. Saherudin NIP. 19590811.198503.1.025	Hakim Tinggi	PTA Kalimantan Selatan	Asesor lama
2.	Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H. NIP. 19611012.198203.2.003	Panitera	PTA Kalimantan Selatan	Asesor lama
3.	Aan Wiharyanto, S.H. NIP. 19770121.200604.1.002	Kasubbag Kepegawain, Organisasi & Tata Laksana	PA Amuntai	Asesor lama
XIX	PTA Kalimantan Tengah			
1.	Drs. M. Sidiq, M.H. NIP. 19621231 199303 1 034	Panitera	PTA Kalimantan Tengah	Asesor baru
2.	Mukti Ali, S.Ag., M.H. NIP. 19730307.199703.1.004	Sekretaris	PTA Kalimantan Tengah	Asesor baru
3.	Sofyansaleh Efriyono, S. Pdi. NIP. 19820416.200604.1.005	Kasubbag TU dan Rumah Tangga	PTA Kalimantan Tengah	Asesor lama
XX	PTA Kalimantan Timur			
1.	Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. NIP. 19550201.198303.1.001	Wakil Ketua	PTA Kalimantan Timur	Asesor baru
2.	Muchammad Jusuf, S.H. NIP. 19600712.198803.1.003	Panitera	PTA Kalimantan Timur	Asesor lama
3.	Ahmad Supiansyah, S.H.I. NIP. 19851026.201212.1.002	Staf	PTA Kalimantan Timur	Asesor lama

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
4.	Dessy Mustika, S.H. NIP. 19861209.200604.2.001	Staf	PTA Kalimantan Timur	Asesor lama
XXI	PTA Gorontalo			
1.	Harsono Hamzah, S.Ag. NIP. 19690514.199703.1.001	Sekretaris	PTA Gorontalo	Asesor baru
XXII	PTA Sulawesi Selatan			
1.	Muhammad Taufiqurrahman, S.Ag., M.H. NIP. 19731108.199903.1.002	Sekretaris	PTA Sulawesi Selatan	Asesor baru
2.	Patahuddin Azis, S.Ag. NIP. 19750517.199903.1.003	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	PTA Sulawesi Selatan	Asesor lama
XXIII	PTA Sulawesi Tengah			
1.	H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. NIP. 19690501.199303.1.003	Panitera	PTA Sulawesi Tengah	Asesor baru
2.	Sutarno, S.H., M.H. NIP. 19680304.199803.1.001	Sekretaris	PTA Sulawesi Tengah	Asesor baru
XXIV	PTA Sulawesi Tenggara			
1.	Drs. H. Zakir NIP. 19621231.199703.1.003	Sekretaris	PTA Sulawesi Tenggara	Asesor baru
2.	Hj. Kudesia, S.H. NIP. 19711215.199903.2.002	Kabag Umum dan Keuangan	PTA Sulawesi Tenggara	Asesor lama
XXV	PTA Sulawesi Utara			
4.	H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.H.I. NIP. 19680503.198903.1.004	Sekretaris	PTA Sulawesi Utara	Asesor baru
XXVI	PTA Nusa Tenggara Barat			
1.	H. Ma'sum Umar, S.H, M.H. NIP. 19680811.199303.1.002	Panitera	PTA Nusa Tenggara Barat	Asesor baru
2.	Misnudin, S.H., M.H. NIP. 19641231.199403.1.046	Sekretaris	PTA Nusa Tenggara Barat	Asesor lama
XXVII	PTA Nusa Tenggara Timur			
1.	H. Lalu Muhamad Taufik, S.H. NIP. 19650603.199303.1.005	Panitera	PTA Nusa Tenggara Timur	Asesor lama
2.	Bahrudin, A.Md, S.H., M.H. NIP. 19630117.198303.1.004	Sekretaris	PTA Nusa Tenggara Timur	Asesor baru

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
3.	Nurhayati Leping Ama, S.Kom. NIP. 19840111.200912.2.004	Kasubbag Kepegawaian dan TI	PTA Nusa Tenggara Timur	Asesor lama
XXVIII	PTA Maluku			
1.	Ismail Difinubun, S.Ag., M.H. NIP. 19690201.200112.1.002	Sekretaris	PTA Maluku	Asesor baru
XXIX	PTA Maluku Utara			
1.	Fatima Albaar, S.Ag., M.H. NIP. 19740926.200003.2.001	Sekretaris	PTA Maluku Utara	Asesor lama
2.	H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. NIP. 19640704.199603.1.001	Wakil Panitera	PTA Maluku Utara	Asesor baru
XXX	PTA Papua			
1.	Drs. H.A. Razak Pellu, S.H., M.H. NIP. 19550401.198603.1.004	Wakil Ketua	PTA Papua	Asesor baru

Direktur Jenderal,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

